



Media: Harian Jogja

Hari: Kamis

Tanggal: 30 April 2020

Halaman: 1

► PERSEBARAN PENYAKIT

Petugas Akan Lebih Tegas Tindak Kerumunan

Sunartono
sunartono@harianjogja.com

JOGJA—Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Bidang Penegakan Hukum akan lebih tegas lagi dalam membubarkan kerumunan atau masyarakat yang tidak taat dengan protokol Covid-19. TNI dan Polri yang tergabung dalam tim di lapangan akan dilengkapi dengan senjata api, begitu juga dengan Satpol PP akan dibekali pentungan. Harapannya masyarakat bisa lebih tertib, mengindahkan *physical distancing*.

Kepala Satpol PP DIY Noviar Rahmad mengatakan untuk membubarkan kerumunan, anggota Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Bidang Penegakan Hukum dibekali pentungan dan TNI Polri membawa senjata api. Senjata yang dibawa itu tidak akan dipakai, tetapi hanya untuk menunjukkan ketegasan.

Petugas mulai dipersenjatai karena saat ini banyak masyarakat yang tidak mengindahkan imbauan jaga jarak fisik, memakai masker, dan masih banyak warga yang bergerombol.

"Untuk membubarkan kerumunan massa kami harus lebih tegas lagi dengan cara dari TNI Polri akan membawa senpi [senjata api saat di lapangan] tetapi tidak untuk dipakai ya. Senpi hanya akan dibawa. Kami [Satpol PP] akan membawa pentungan tetapi tidak untuk dipakai," katanya Rabu (29/4).

Ia menambahkan pihak yang menciptakan kerumunan akan diminta membuat surat pernyataan untuk tidak mengulang. Kafe atau warung yang masih buka dengan posisi kursi tidak berjarak satu meter, salah satu kursi yang berhimpitan akan diminta petugas. Begitu juga untuk warung lesehan yang tidak mengindahkan jaga jarak akan langsung diangkut oleh petugas.

► Halaman 6

Petugas Akan...

Ketundian bagi tempat usaha akan diberikan surat teguran sampai pada pencabutan izin. Menurut Noviar kebijakan ini tidak perlu membuat regulasi baru, karena sebelumnya sudah ada aturan. "Jadi kalau ada tempat usaha masih ngeyel tidak menerapkan *physical distancing* terancam dicabut izinnya," ucapnya.

Noviar menambahkan Tim Gugus Tugas sudah membentuk empat regu untuk berjaga guna merespons aduan dari masyarakat terkait dengan adanya kerumunan. Menurutnya aduan kerumunan itu datang dari berbagai wilayah yang jumlahnya sudah ratusan setiap harinya. Tim Gugus Tugas DIY bersama Kota Jogja akan menindaklanjuti aduan yang berada di dalam Ring Road, sedangkan di luar Ring Road akan diserahkan kepada Gugus Tugas kabupaten sesuai wilayah.

Menanggapi masih adanya pihak yang menyelenggarakan Salat Tarawih berjamaah, Noviar akan mengidentifikasi titiknya di mana saja. Kemudian datanya akan diserahkan kepada Kanwil Kemenag DIY, dengan harapan Kemenag setempat memberikan peringatan kepada takmir masjid yang masih menyelenggarakan Tarawih. "[Masjid yang masih menggelar Tarawih] masih kami

identifikasi, kami minta bantuan Kemenag untuk menegur," ucapnya.

Sejak 13 April 2020 hingga Rabu (29/4) Tim Gugus Tugas sudah membubarkan 1.650 titik kerumunan melalui cara persuasif mendatangi langsung di lapangan. Selain itu banyak ditemukan pelanggaran warga tidak memakai masker.

Tak Ajukan PSBB

Gubernur DIY Sri Sultan HB X menyatakan belum akan mengajukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) ke Pemerintah Pusat meski terjadi lonjakan jumlah pasien Covid-19 harian sebanyak 10 kasus. Sultan menilai lonjakan itu karena adanya Jemaah Tabligh kelompok WNA India dan Klaster Ijtima Ulama Dunia di Gowa, Sulawesi Selatan.

"Enggak [DIY belum akan mengajukan PSBB], 10 itu kan [kaitan] dengan kemarin yang dari [WNA] India sama yang [Jemaah] Tabligh di Jakarta sama di Gowa itu," katanya di Kepatihan.

Sultan menambahkan upaya penanganan Covid-19 terus dilakukan, terutama pada kasus Jemaah Tabligh dan Ijtima Ulama Dunia di Gowa yang memberikan kontribusi peningkatan kasus di DIY.

"Ya [peningkatan signifikan itu] karena kondisi itu saja [adanya Jemaah Tabligh dan Ijtima Gowa], itu saja, tetapi mereka [WNA India yang negatif] kami rawat di Gunung Sempu," katanya.

Dalam berbagai kesempatan Sultan mengimbau kepada seluruh warga DIY agar tidak beraktivitas keluar rumah jika tidak ada keperluan penting yang membuat seseorang terpaksa harus keluar rumah. Upaya ini untuk memutus rantai penyebaran virus Corona.

Disinggung soal stok pangan, Sultan menambahkan di wilayah DIY memang ada beberapa desa yang sudah termasuk swasembada pangan tetapi ada yang belum.

Namun Sultan memastikan kondisi pangan DIY di tengah pandemi ini tidak ada masalah. "Ya kalau memang kami bikin desa, ada yang desa cukup pangan, ada yang swasembada kan gitu. Namun ada desa yang belum bisa memenuhi, tetapi selama ini kami punya program bersama untuk bisa produksi. Jadi enggak masalah," ucapnya.

Stok pangan di DIY, lanjut Sultan, masih aman untuk tiga hingga enam bulan ke depan. "Ya kan tiga sampai enam bulan kan masih bisa kan dari lembaga TPID [tim pemantau inflasi daerah] kan sudah mengeluarkan bahwa tiga sampai enam bulan stok ada," katanya.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 02 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005